

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Corporate governance merupakan konsep menggunakan dasar perspektif hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Irfan (2002) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai terhadap kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Penyebab timbulnya manajemen laba akan dapat dijelaskan menggunakan teori agensi. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan parapemilik (*principal*) untuk memperoleh kompensasi sesuai pada kontrak. Kepentingan tersebut terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

Eisenhardt (1989) dalam Darmawati (2004) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu:(1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya

manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik. Oleh karena itu manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

2. *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *corporate governance* adalah sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau kata lain system yang mengarah dan mengendalikan perusahaan. Keasey dalam Sunarto (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai struktur, proses, budaya dan system untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi suatu organisasi.

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara

masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) dalam Wiryo (2005) yang menyatakan *corporate governance* berkaitan secara mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Iskandar dkk (1999) dalam Theresia (2005) menyatakan bahwa *corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh *return*. Selain itu *corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (*insider*) agar bertindak yang terbaik bagi kepentingan investor (kreditur atau *shareholder*) (Prowson, 1998 dalam Theresia, 2005).

Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dengan agen. Jansen dan Meckling (1976) dalam Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang

pertanggungjawaban kinerjanya, dengan itu *principal* dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahterannya, serta memberikan kompensasi kepada agen.

Laporan keuangan digunakan *principal* untuk memberikan kompensasi kepada agen dengan harapan dapat mengurangi konflik keagenan dapat dimanfaatkan oleh agen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akuntansi akrual yang dicatat dengan basis akrual (*accrual basis*) merupakan subjek *managerial discretion*, karena fleksibilitas yang diberikan oleh GAAP memberikan dorongan kepada manajer untuk memodifikasi laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan laba seperti yang diinginkan, meskipun menciptakan distorsi dalam pelaporan laba (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Syahputra, 2005). Salah satu cara yang diharapkan dapat digunakan untuk mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kolola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dari kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri, 2003). David Melvill dalam Sunarto (2003) menyatakan bahwa auditor internal dapat berperan dalam *corporate governance* dalam hal-hal: (a) membantu dewan dalam menilai risiko utama dan memberi nasihat pada pihak manajemen; (b) mengevaluasi system internal control dan bertanggung jawab kepada komite audit; (c) menelaah peraturan *corporate governance* minimal setahun sekali.

Suratman (2003) menyatakan bahwa jika *corporate governance* baik (*good corporate governance-GCG*) maka GCG akan mempunyai manfaat antar lain: (a) entitas bisnis akan menjadi efisiensi; (b) meningkatkan kepercayaan publik; (c) menjaga *going concern* perusahaan; (d) dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan; (e) meningkatkan produktivitas; dan (f) mengurangi distorsi (*management risk*).

3. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang (Iturriaga dan Sanz dalam Eddy dan Mas'ud, 2003) yaitu: pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information approach*). Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan merupakan sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik kepentingan diantara berbagai pemegang klaim. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

Masalah *corporate governance* merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Masalah tersebut dikelompokan sesuai karakteristik perusahaan (Agustina, 2006):

1. Perusahaan struktur kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*)

Dalam struktur kepemilikan yang tersebar konflik keagenan antara

kurangnya insentif bagi para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap manajer karena biaya pengawasan yang diperlukan cukup besar. Struktur kepemilikan yang tersebar memang dapat memberikan manfaat dalam hal ini pemberian kesempatan yang lebih besar kepada manajer untuk memiliki inisiatif, tetapi karena kurangnya pengawasan manajer juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindakan dan keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Struktur kepemilikan menyebar adalah struktur kepemilikan perusahaan yang banyak dikendalikan oleh publik dan tidak memiliki pengawasan utama serta memiliki proporsi kepemilikan yang kecil. Pengendalian pemegang saham cenderung lemah, karena lemahnya *monitoring* pemegang saham (Zhuang dkk dalam Bambang, 2003). La Porta dkk dalam Tri (2003) menemukan bahwa kepemilikan yang menyebar hanya terjadi pada negara dengan perlindungan legal yang sangat baik terhadap pemilik.

2. Perusahaan struktur kepemilikan terkonsentrasi (*consentrated ownership*)

Struktur kepemilikan terkonsentrasi adalah struktur kepemilikan perusahaan lebih banyak dikendalikan oleh keluarga atau negara dan memiliki proporsi kepemilikannya yang sangat besar. Dalam struktur kepemilikan seperti ini, ada yang dinamakan pemegang saham mayoritas (*majority shareholders*) atau pemegang saham minoritas (*minority shareholders*). Pemegang saham besar memiliki insentif yang lebih besar untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap keputusan perusahaan, karena mereka merasakan manfaat yang besar

Melalui pengawasan yang lebih baik, pemegang saham besar dapat mengatasi masalah keagenan yang timbul dari pemisahan pengendalian dan kepemilikan pemegang saham mayoritas biasanya mempunyai informasi yang lebih lengkap terhadap target *company* dibandingkan dengan pemegang saham minoritas sehingga terjadi asimetri informasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali memiliki kendali terhadap manajemen sehingga keputusan yang diambil cenderung mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Pihak manajemen lebih bersifat pasif karena campur tangan pemilik begitu besar.

4. Manajemen Laba

Scott (2000) dalam Rahmawati dkk (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku *oportunistik* manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political costs* (*Opportunistic Earnings Management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earnings Management*), dimana manajemen laba member manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba,

laba sepanjang waktu.

Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 1989 dalam Arif dan Bambang, 2007). Menurut Fisher dan Rosenzweig (1995) dalam Komarudin dkk (2007), manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengkaitkan dengan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang.

Menurut Prihat dan Gudono (2000) dalam Rahmawati dkk (2006) mengartikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan *General Accepted Accounting Principles (GAAP)* untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan. Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan menambah bias dalam laporan keuangan serta mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Lilis dan Ainun, 2000).

Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Beberapa pihak yang berpendapat bahwa manajemen laba merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, mempunyai alasan bahwa manajemen laba berarti suatu pengurangan dalam keandalan informasi laporan

mengenai laba untuk mengevaluasi *return* dan risiko portofolionya (Ashari dkk, 1994 dalam Assih, 2004).

Watt dan Zimmerman (1986) dalam Rahmawati dkk (2006), menyatakan bahwa dalam *positif accounting theory* terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam suatu perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, maka seorang manajer perusahaan akan melakukan kenaikan laba saat ini yakni dengan memilih metode akuntansi yang mampu menggeser laba dari masa depan ke masa kini. Tindakan ini dilakukan dikarenakan manajer termotivasi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi untuk masa kini.

Kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada dibawah *bogey*, maka tidak akan ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika laba berada diatas *cap*, maka manajer juga tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada dibawah *bogey* manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer hanya akan menaikkan laba bersih perusahaan hanya jika

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Dalam suatu perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* cukup tinggi, maka akan mendorong manajer perusahaan untuk cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan berakibat menimbulkan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor dan bahkan perusahaan dapat terancam melanggar perjanjian utang.

3. *Political Cost Hypothesis*

Perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, akan mendorong manajer untuk memilih metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Adanya biaya politik dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. *Agency theory* terdapat asumsi bahwa setiap individu semata mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga akan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Sedangkan pemegang saham sebagai pihak *principal* tentu akan mengadakan kontrak dengan tujuan untuk

5. Kinerja Keuangan

Menurut Indra (2001) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang terutang dalam perumusan skema strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Kinerja perusahaan merupakan prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan (Mustafidah, 2004 dalam Agustina, 2006). Kinerja merupakan hasil nyata yang dapat dicapai dipergunakan untuk menunjang dicapainya hasil positif. Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara menerus oleh manajemen.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonseia dalam Anita dan Rahardian (2003) kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cermin dari kemampuan perusahaan dalam mengelola

dan sumber daya. Selain itu tujuan pokok kinerja adalah

untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Dukungan empiris perihal faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain Penelitian yang dilakukan oleh Husnan (2000) dalam Sunarto (2003), menemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada manajemen dibanding dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi. Xu dan Wang (1999) dalam Theresia (2005) menemukan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh *legal person shareholder* dapat memonitor manajemen secara lebih efektif melalui pengendalian oleh *board of directors*, pemilihan karyawan perusahaan dan pemberian kompensasi terhadap *chief corporate officer*.

B. Penurunan Hipotesis

1. Corporate Governance dan Manajemen Laba

Sesuai dengan kajian dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Sebagai pengelola perusahaan, manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik

mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya dan dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*) (Haris, 2004). Asimetri antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) akan memberi kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Richardson, 1998).

Corporate governance terdiri dari kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independent dan komite audit. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teori ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen dan Meckling dalam Haris, 1976). Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Penelitian Warfield et al (1995) yang menguji hubungan kepemilikan manajerial dengan *discretionary accrual* dan kandungan informasi laba menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan secara negatif dengan *discretionary accrual*. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa kualitas laba meningkat ketika kepemilikan manajerial tinggi.

Gabrielsen et al (2002) menguji hubungan antara kepemilikan manajerial

data pasar modal Denmark ditemukan adanya hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accrual* dan hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan kandungan informasi laba. Smith (1976) dalam Suaryana (2005) menemukan bahwa *income smoothing* secara signifikan lebih sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh manajer dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh pemiliknya.

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan.

Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance 2001* adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris telah dilakukan

Kingston, Bassall, Bone, dan Young (1998) meneliti efektifitas dewan

komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan tahun selama periode 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan.

Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, dari pada kehadiran komite audit. Analisis lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan (*outsider director*) juga berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris di Indonesia juga banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik

yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap *return* perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap *return*.

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan surat edaran BEJ, SE-008/BEJ/12 2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang

yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris

hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
- d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Penelitian mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh Davidson, Xie, dan Xu (2004) yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukkan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh terhadap akrual kelolaan ditunjukkan oleh makin seringnya komite audit bertemu dan pengaruh tersebut ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Carcello et al. (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit dibidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti mengurangi manajemen laba.

Suaryana (2005) meneliti hubungan antara keberadaan komite audit yang memenuhi syarat dan pengaruhnya terhadap *earnings response coefficient*. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah *earnings reponse coefficient* perusahaan yang telah memiliki komite audit yang memenuhi syarat lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite audit yang memenuhi syarat. Ini berarti keberadaan komite audit yang memenuhi syarat dalam perusahaan direspon lebih baik oleh pasar.

Utaman dan Leonardo (2006) memberikan bukti empiris tentang dampak komposisi komite audit dan kendali dari pengelola perusahaan pada efektivitas komite audit berdasarkan survey atas komite audit perusahaan yang listing di BEI. Mereka menemukan bukti bahwa komposisi komite audit memiliki dampak positif

menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit secara signifikan selain komposisinya, diantaranya kekuatan mengendalikan perusahaan oleh pemegang saham, makin banyaknya perwakilan komisaris independen dalam dewan komisaris, pengendalian oleh dewan komisaris, dan lamanya komite audit menjabat.

Penelitian Veronica dan Utama (2005) menguji pengaruh keberadaan komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut melaporkan bahwa variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Artinya keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi diperusahaan. Penelitian oleh Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan yang signifikan dengan akrual kelolaan perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya untuk periode 2001-2002, artinya kehadiran komite audit secara efektif menghalangi peningkatan manajemen laba diperusahaan tersebut.

Veronica dan Bachtiar (2004) juga meneliti pengaruh interaksi dari persentase komite audit dengan akrual diskresioner, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya koefisien positif yang signifikan dalam hubungan antara reaksi pasar dan interaksi antara komite audit dan akrual diskresioner. Hal ini membuktikan bahwa pasar menilai positif akrual kelolaan perusahaan yang memiliki komite audit yang diindikasikan dengan tingginya return perusahaan.

Wedari (2004) menguji pengaruh interaksi antara dewan komisaris dan komite audit terhadap praktik manajemen laba. Dengan menggunakan sampel

Wedari (2004) menunjukkan interaksi dewan komisaris dengan komite audit justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian lain yang serupa, artinya dengan adanya dewan komisaris dan komite audit belum berhasil mengurangi manajemen laba karena keberadaan mereka manajer dapat melakukan manajemen laba dengan lebih leluasa. Setiawan (2006) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba (*earnings response coefficient*), artinya dengan adanya komite audit maka perusahaan dapat meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan.

Wilopo (2004) menganalisis hubungan dewan komisaris independen, komite audit, kinerja perusahaan dan akrual diskresioner. Dari penelitian tersebut dilaporkan bahwa kehadiran komite audit dan dewan komisaris independen mampu mempengaruhi secara negatif praktik manajemen laba di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme *corporate governance* diatas penting untuk menjamin terlaksananya praktik perusahaan yang adil (*fair*) dan transparan.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang

manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

Berdasarkan pada uraian diatas, dikembangkan hipotesis hubungan *corporate governance* dengan manajemen laba sebagai berikut:

H₁: *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2. *Corporate governance* dan kinerja keuangan

Durnev dan Kim dalam Deni dkk (2005) memberikan bukti bahwa praktek *corporate governance* lebih bervariasi di negara yang memiliki lingkungan hukum yang lebih lemah. Klapper dan Love dalam Deni dkk (2005) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Penemuan penting lainnya adalah bahwa penerapan *corporate governance* ditingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik pada perusahaan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dengan lingkungan hukum yang buruk.

Beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda, penelitian yang dilakukan Theresia (2005) dengan menggunakan laporan keuangan (*disclosure*) bahwa *corporate governance* berhubungan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Daily dkk, hasil survei CBI, Deloitte dan Touche, Kakabadse dalam Deni dkk (2005) menyatakan bahwa dengan menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

informasi (*information asymmetric*) antara manajemen dan pemakai laporan keuangan memberi kesempatan dan mendorong manajemen bersikap oportunistis dengan memperbaiki profil laba akuntansi. Sikap oportunistis ini tidak sejalan dengan semangat *corporate governance*, karena rekayasa keuangan mengakibatkan informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat dan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sikap oportunistis ini dinilai sebagai sikap curang (*fraud*) manajemen yang diimplikasikan dalam laporan keuangannya pada saat menghadapi (*intertemporal choice*) Beneish dalam Dri dan Haris, 2003). Sikap curang tersebut didefinisikan sebagai satu atau lebih tindakan yang disengaja yang didesain untuk menipu orang lain yang menyebabkan kehilangan kekayaannya (*financial*). Walaupun dilakukan manajemen karena kekuasaannya dalam menguasai informasi, rekayasa ini tidak sejalan dengan semangat *corporate governance* yang menekankan pentingnya hak pemakai laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat (YPPMI & SC dalam Sri dan Haris, 2003).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang bertujuan agar perusahaan dikelola dengan baik dan akan menimbulkan keteraturan (efektif dan efisiensi) kinerja dalam perusahaan. Efek pengelolaan ini akan mempengaruhi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dan *stakeholder* lain dengan mendasarkan pada kerangka, aturan dan

perusahaan dalam bentuk laporan keuangan sehingga pihak-pihak pemakai laporan keuangan akan menilai hasil kinerja perusahaan.

Perspektif *agency theory*, *weak governance* merupakan bagian dari *agency costs* yang terjadi dan mencerminkan adanya *divergence of interest* antara *principal* (pemilik) dan agen (manajemen) (Riyanto, 2005). Agen yang *risk averse* dan cenderung mementingkan dirinya sendiri (*self serving behavior*) akan mengalokasikan *resources* (berinvestasi) yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Disamping itu, agen juga melakukan *shirking* dengan cara menyalahgunakan (*abuse*) *resources* dalam bentuk *pecuniary* dan *non-pecuniary benefits*.

Tindakan yang 'merugikan' perusahaan ini bisa terjadi karena adanya *information asymmetry* antara *principal* dan agen menyangkut masalah yang berhubungan dengan organisasi. Akibat adanya *information asymmetry* tersebut, pemilik kesulitan untuk mengetahui (*observe*) apakah agen sudah bertindak sebagaimana mestinya (Eisenhardt, 1985). Adanya *inherent agency problems* dalam pengelolaan organisasi modern ini mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik jika pemilik bisa mengendalikan perilaku manajemen agar tidak menghamburkan *resources* perusahaan, baik dalam bentuk investasi yang tidak layak, atau pun dalam bentuk *shirking*.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Namun, pada umumnya penelitian yang dilakukan hanya menekankan pada salah satu aspek

dalam Rahmawati (2006) *agency costs* terdiri dari dua, yaitu *monitoring costs* dan *bonding costs*. *Corporate governance* dikatakan dapat menurunkan *monitoring costs* akibat adanya peningkatan pengawasan dan transparansi (penurunan *information asymmetry*). Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa adanya pengaruh komposisi kepemilikan dan komposisi dewan komisaris (*board of directors*) terhadap kinerja.

Penelitian yang dapat menunjukkan adanya manfaat *corporate governance* elemen kedua dari *agency costs*, yaitu *bonding cost*, belum banyak dilakukan. *Bonding costs* merupakan *agency costs* yang ditanggung oleh agen, yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada *principal* bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya (manajer akan berbuat demi kebaikan perusahaan). Agen sadar bahwa *principal* 'curiga' kepada mereka dan oleh karena itu akan cenderung menyalahkan mereka jika ada sesuatu yang salah. Kesadaran akan hal ini memunculkan upaya (*efforts*) dari manajemen agar mereka dipercaya oleh *principal*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menunjukkan itikad baik dan memberikan laporan yang komprehensif kepada *principal*.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Booz-Allen & Hamilton (1998) dan McKinsey & Company (2001) menunjukkan seberapa buruknya penilaian pasar terhadap implementasi *corporate governance* di Indonesia. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan dan memperbaiki citra *governance* mereka. Manajemen

dan meningkatkan citra mereka dengan menepatkan *compliance atas good*

corporate governance codes sebagaimana disarankan oleh lembaga yang dipercaya, yaitu Komite Nasional Kebijakan atas *Corporate Governance* (KNKCG) dan mengungkapkan kepatuhan tersebut dalam laporan tahunan. Sejauh mana kepatuhan ini membawa dampak positif bagi perusahaan, masih merupakan pertanyaan empiris yang perlu dijawab. Penelitian ini melihat pengaruh kembali atas *corporate governance* terhadap kinerja.

Berdasarkan beberapa contoh kasus tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, maka akan dipertanyakan akan bagaimana efektivitas penerapan *corporate governance* yang juga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Berdasarkan pada uraian diatas, dikembangkan hipotesis hubungan *corporate governance* dengan kinerja keuangan sebagai berikut:

H₂: *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

3. Struktur Kepemilikan dan Manajemen Laba

Struktur kepemilikan yang menyebar luas umumnya hanya terdapat di

sedang berkembang, umumnya perusahaan masih dikendalikan oleh keluarga. La Porta dkk (1999), dalam Arifin (2003), melaporkan bahwa 85% dari perusahaan Spanyol mempunyai pemegang saham kendali, dibandingkan Inggris yang hanya 10% dan Amerika Serikat 20%.

Anderson dkk (2002) mengatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga mempunyai struktur yang menyebabkan berkurangnya konflik agensi antara pemegang saham dan kreditur, dimana kreditur menganggap kepemilikan keluarga lebih melindungi kepentingan kreditur. Anderson & Reeb (2002) menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas justru diuntungkan dari adanya kepemilikan keluarga. Arifin (2003) menunjukkan bahwa perusahaan publik diIndonesia yang dikendalikan keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. Menurutnya, dalam perusahaan yang dikendalikan keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena berkurangnya konflik antara *principal* dan *agent*.

Jika kepemilikan keluarga lebih efisien, maka pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi pengelolaan laba yang oportunistik dapat dibatasi. Tetapi pengendalian yang lebih efisien dalam kepemilikan keluarga tersebut besar kemungkinan tidak berlaku diperusahaan konglomerasi seperti yang banyak terdapat diIndonesia.

Perusahaan konglomerasi, biasanya sebagian besar kekayaan pemilik tidak berada disatu perusahaan, tetapi tersebar diberbagai perusahaan. Jika hanya sedikit

perusahaan *go public* tersebut dikendalikan keluarga, tetapi pengelolaan laba yang *opportunistic* mungkin justru tinggi. Kemungkinannya karena perusahaan yang *go public* tersebut hanya dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk digunakan oleh kelompok perusahaannya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Durnev dan Kim dalam Deni dkk (2005) yang menemukan bahwa besaran pengelolaan laba lebih tinggi untuk perusahaan yang mempunyai kelompok afiliasi dibanding yang tidak mempunyai kelompok afiliasi.

Berarti perusahaan dengan kelompok usaha afiliasi memberikan pemegang saham pengendali lebih banyak insentif dan kesempatan untuk melakukan pengelolaan laba. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, penulis menduga bahwa pada perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga dan bukan perusahaan konglomerasi akan membatasi pengelolaan laba yang oportunistis, tetapi akan mendorong pengelolaan laba yang bersifat efisien (berhubungan positif).

Berdasarkan pada uraian diatas, dikembangkan hipotesis hubungan struktur kepemilikan dengan manajemen laba sebagai berikut:

H₃: Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap manajemen laba.

4. Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Struktur kepemilikan dapat dikelompokkan dalam kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar. Selain itu juga dapat dikelompokkan secara lebih spesifik lagi dalam kategori struktur kepemilikan yang meliputi

individual domestik (Xu, 1997 dalam Theresia, 2005). Xu dan Wang (1999) dalam Theresia (2005) membuktikan bahwa struktur kepemilikan (mix dan konsentrasi) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Fuerst dan Kang (2000) menemukan hubungan yang positif antara *insider ownership* dengan nilai pasar setelah mengendalikan kinerja perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif (Slovin dan Sushka, 1993). Hubungan antara *analysts coverage* yang merupakan *external monitoring function* dan Tobins'Q sebagai proksi nilai perusahaan adalah positif dan signifikan (Chen dan Steiner, 2000).

Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham, sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (*signaling theory*). Peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dimasa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar (Brigham, 1999).

Peningkatan dividen dilakukan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam mencari tambahan dana dari pasar modal dan perbankan. Dividen mengandung informasi atau sebagai isyarat (*signal*) akan prospek perusahaan (Roseff, 1982). Pendapat Roseff didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Asquith dan Mullins (1983), bahwa pengumuman meningkatnya dividen telah meningkatkan *return* saham dan dapat digunakan untuk menangkal isu-isu yang

penelitian dalam kaitannya dengan relevansi keputusan pendanaan, menemukan bahwa sehari sebelum dan sesudah pengumuman peningkatan proporsi hutang terdapat kenaikan *abnormal return*, sebaliknya pada saat perusahaan mengumumkan penurunan proporsi hutang berpengaruh kepada penurunan *abnormal return*.

Pengaruh dari struktur kepemilikan perusahaan secara lebih lanjut dapat dijelaskan dari hasil penelitian berikut ini: (1) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemilikan terkonsentrasi dan produktifitas sebagai salah satu proksi dari kinerja perusahaan. (2) Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi lebih kuat untuk perusahaan yang didominasi oleh *legal person shareholders* dari pada perusahaan yang didominasi oleh perusahaan. (3) Profitabilitas perusahaan berhubungan positif dengan proksi pemilikan saham oleh *legal person* tetapi berhubungan negatif dengan proksi pemilikan saham oleh perusahaan. (4) Produktifitas tenaga kerja cenderung menurun saat proporsi kepemilikan saham oleh perusahaan meningkat. Kepemilikan saham oleh *legal person shareholders* dapat memonitor manajemen secara efektif melalui pengendalian oleh *board of directors*, pemilihan karyawan perusahaan dan pemberian kompensasi terhadap *chief corporate officer*.

Berdasarkan pada uraian diatas, dikembangkan hipotesis hubungan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan sebagai berikut:

H₄: Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

5. Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan

Salah satu cara untuk memanipulasi kinerja oleh manajemen perusahaan

yang merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual dengan mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya (Healey dan Wahlen, 1998; Du Charme *et al*, 2000 dalam Sri dan Haris, 2003). Sikap seperti sering disebut dengan sikap *opportunistic* dimana hal ini dinilai sebagai sikap curang (*fraud*) manajemen yang diimplikasikan dalam laporan keuangannya pada saat menghadapi *intertemporal choice* (Beneish, 2001 dalam Sunarto, 2003).

Manipulasi kinerja sampai saat ini sering dikenal dengan istilah *earnings management* (manajemen laba) ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan melakukan penurunan laba (*income decreasing*), perataan laba (*income smoothing*) dan kenaikan laba (*income increasing*). Manajemen laba yang pertama yakni dengan menggeser pendapatan masa depan (*future earnings*) menjadi pendapatan sekarang (*current earnings*) atau sebaliknya. Selanjutnya, menggeser biaya sekarang (*current cost*) menjadi biaya masa depan (*future cost*) atau sebaliknya sehingga mengakibatkan laba pada periode bersangkutan dapat dilaporkan dengan lebih tinggi atau lebih rendah (Esperlaub, 1999 dalam Deni dkk, 2005).

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual. Padahal kinerja fundamental perusahaan tersebut digunakan oleh pemodal untuk menilai prospek perusahaan, yang tercermin pada

Manajemen laba yang dilakukan manajer pada laporan keuangan

tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja saham (Haris, 2004 dalam Arief dan Bambang, 2007).

Bryshaw dan Eldin (1989) menemukan bukti bahwa alasan manajemen melakukan manajemen laba adalah: (1) skema kompensasi manajemen yang dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan; serta (2) fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik untuk mengganti manajemen dengan pengambilalihan secara langsung.

Cornett et al., (2006) dalam Arief dan Bambang (2007) menemukan adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap penurunan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba dan berhubungan positif dengan CFROA. Hasil ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa CFROA merupakan fungsi positif dari indikator mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* dapat mengurangi dorongan manajer melakukan *earnings management*, sehingga CFROA yang dilaporkan merefleksikan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, dikembangkan hipotesis hubungan manajemen laba dengan kinerja keuangan sebagai berikut:

II - Manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

C. Model Penelitian

